

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan hal yang tidak asing lagi di Negara Indonesia, seperti yang diketahui PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. (Permensos No. 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) memiliki 26 kategori dengan kriteria tertentu, salah satunya ialah Anak Jalanan. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. (Permensos No. 8 Tahun 2012 tentang PMKS dan PSKS). Anak jalanan termasuk dalam kategori anak terlantar menurut Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Jumlah anak jalanan di Indonesia berdasarkan data Kementerian Sosial yang diambil dari *Dashboard* Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) SIKS-NG per-15 Desember 2020, sebanyak 67.368 orang. Dan yang terbanyak tersebar di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dokumen statistik Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tahun 2021 mencatat, terdapat 3.605 anak jalanan di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan di Jawa Barat tergolong banyak.

Anak-anak jalanan selalu berada dalam situasi yang lemah sehubungan dengan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. dan yang

mengejutkan, kehidupan mereka, karena dalam keunikan mereka, seorang anak jalanan memiliki perbedaan pemahaman dari anak-anak biasa tentang pergaulan dengan orang dewasa, kewajiban terhadap keluarga dan kerabat, pergaulan dengan lawan jenis, uang tunai, dan keyakinan yang ketat. Anak-anak yang hidup di jalanan sangat bertanggung jawab kepada keluarga mereka. Makna keluarga bagi mereka adalah pertemuan di mana ia harus ikut menjaga ketahanan mereka. Untuk anak jalanan, pemahamannya tentang keluarga adalah berapa banyak uang yang harus diberikan untuk orangtua mereka untuk membantu kehidupan sehari-hari mereka. Apalagi mereka sudah memiliki kewajiban terhadap diri mereka sendiri, misalnya membayar biaya sekolah dengan biaya yang didapat dari keringat mereka. (Bajari Atwar, 2012).

Anak jalanan merupakan kelompok sosial yang memerlukan perlindungan khusus berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, tercantum di dalam Pasal 1 bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”. Oleh karena itu, anak-anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental, dan sosial secara optimal. Maka upaya perlindungan anak diperlukan untuk menjamin kesejahteraan mereka dengan memastikan bahwa mereka diperlakukan tanpa diskriminasi dan dihormati hak-haknya.

Kehadiran anak jalanan menunjukkan tidak adanya pertimbangan dari otoritas publik sehubungan dengan strategi di bidang kesejahteraan anak. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak jalanan memerlukan penanganan

khusus dari pemerintah daerah dan dinas terkait, karena anak-anak yang seharusnya bersekolah justru berada di jalanan untuk bekerja. Penanganan yang terkait dengan anak jalanan membutuhkan SDM yang mumpuni. Penanganan anak jalanan juga bukan kewajiban satu pihak saja, melainkan kewajiban bersama yang dilakukan oleh Pemerintah, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), akademisi, dan masyarakat secara keseluruhan. Masalah anak jalanan dapat diselesaikan dengan asumsi setiap kerangka di mata publik saling terkait satu sama lain. (Soetomo, 2008).

Kota Cimahi adalah sebuah kota otonom yang termasuk bagian dari Provinsi Jawa Barat, yang juga mengalami permasalahan anak jalanan. Kota Cimahi memiliki jumlah anak jalanan mencapai 77 orang pada tahun 2020 berdasarkan Data Dinas Sosial Kota Cimahi, dengan jumlah penduduk sebanyak 560.512 jiwa (BPS Kota Cimahi, 2022). Dalam upaya mengatasi permasalahan anak jalanan tersebut, Dinas Sosial Kota Cimahi berupaya mengurangi dan mengentaskan anak-anak yang turun ke jalan agar anak-anak tersebut dapat terpenuhi hak-haknya melalui Program Pembinaan Anak Jalanan yang bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan kemampuan diri anak agar dapat kembali ke rumah bersama keluarga, yang didalamnya terdapat pemberian kegiatan edukasi hingga hiburan, selain itu anak-anak juga diberikan kesempatan untuk bertukar pikiran dan mengemukakan pendapatnya tentang kehidupan sehari-hari. Tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, bahwa: “agar upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah beserta orangtua, keluarga, dan masyarakat secara luas”.

Program pembinaan untuk anak jalanan ini telah berjalan sejak tahun 2016. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Cimahi tahun 2023 terdapat 49 anak jalanan yang dibina, selanjutnya berdasarkan observasi awal peneliti, terdapat 10 orang anak yang sudah berhasil disekolahkan ke dalam sekolah non formal, dan 23 orang anak ke dalam sekolah formal. Selain itu, program

pembinaan tersebut banyak melakukan kegiatan kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya kegiatan yang diberikan untuk pembinaan orangtua anak jalanan bersama dengan organisasi IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia), yang merupakan tempat dimana pelaku bisnis dapat bekerja sama dan membangun jaringan, tujuannya agar orangtua dapat berdaya secara ekonomi. Dari berbagai kegiatan kerjasama tersebut, Program Pembinaan Anak Jalanan mendapat apresiasi secara lisan dari berbagai pihak yang melakukan kegiatan kerjasama. Selain itu, apresiasi secara lisan juga didapatkan dari Wali Kota Cimahi dan Kepala Dinas Sosial Cimahi karena tercapainya tujuan dari program pembinaan tersebut. Hal ini menunjukkan keberhasilan Dinas Sosial Kota Cimahi dalam menangani permasalahan anak jalanan melalui program yang dijalankan untuk membina anak-anak jalanan dan orangtua dari anak jalanan yang ada di Kota Cimahi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai implementasi dari Program Pembinaan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Cimahi yang telah berhasil dalam melaksanakan program sesuai dengan tujuannya, dengan meneliti implementasi dari program tersebut yang difokuskan pada proses implementasi. Dalam proses implementasi atau pelaksanaan suatu program dikatakan dapat berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali jika dilihat dari jenis hasil yang dicapai atau hasilnya. Karena dalam siklus ini terdapat berbagai komponen yang dampaknya mendukung atau menghambat tercapainya tujuan suatu program. Alasan tersebut sejalan dengan pernyataan bahwa kelangsungan suatu kebijakan atau program tergantung pada tingkat kesamaan antara program dan penerima, kesesuaian program dengan asosiasi pelaksana dan kesesuaian kelompok penerima program dengan asosiasi pelaksana. (Korten dan Syahrir, 1980). Sejumlah faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam mengimplementasikan kebijakan ialah standar dan sasaran, sumber daya, komunikasi pelaksana, sikap pelaksana, karakteristik

pelaksana, serta lingkungan sosial, politik dan ekonomi. (Van Meter dan Van Horn, 1975).

Berdasarkan keterkaitan hal tersebut, maka pentingnya memperhatikan unsur-unsur dalam sebuah proses implementasi karena dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu program yang dijalankan. Oleh karena itu, dengan melihat keberhasilan yang dicapai oleh Dinas Sosial Kota Cimahi dalam memenuhi kebutuhan dasar anak jalanan melalui program yang dijalankan, penelitian ini akan difokuskan pada bagian proses implementasi dari program tersebut. Implementasi adalah gerakan yang berhubungan dengan perlakuan terhadap suatu tugas dengan menerapkan sarana (perangkat) untuk mendapatkan suatu akibat. (Tachjan, 2006).

Penelitian lain telah dilakukan berkaitan dengan implementasi program anak jalanan, terdapat lima penelitian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti, yang pertama ialah penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Medan (Studi Pada Kantor Dinas Sosial Kota Medan)" menghasilkan penelitian dengan mendeskripsikan implementasi dari kebijakan program pembinaan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan serta menjelaskan kendala atau hambatan dalam pelaksanaan program, dengan aspek yang digunakan ialah mengenai aspek pelaksanaan, aspek faktor pendukung dan faktor penghambat program. Penelitian tersebut dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui, observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, penelitian terdahulu berjudul "Pembinaan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung" menghasilkan penelitian bahwa pelaksanaan pembinaan anak jalanan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung maupun masyarakat masih menuai berbagai permasalahan, seperti keterbatasan SDM, dana, sarana dan prasarana, serta kualitas pelayanan yang masih bervariasi, akibatnya usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial belum menunjukkan hasil yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, dengan aspek yang digunakan ialah berupa aspek pelaksanaan

dan analisa program. Penelitian tersebut dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui, observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian terdahulu selanjutnya berjudul “Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Dinas Sosial)” menghasilkan penelitian dengan mendeskripsikan implementasi dari Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar terutama pada aspek kinerja, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, kecenderungan/disposisi para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Penelitian tersebut dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui, observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya penelitian terdahulu berjudul “Evaluasi Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru” menghasilkan penelitian bahwa program pembinaan terhadap anak jalanan yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum berjalan secara efektif karena beberapa hambatan yang terjadi, dengan aspek yang digunakan adalah berupa hambatan dalam evaluasi program. Penelitian tersebut dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui, observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian terdahulu yang terakhir ialah berjudul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan di Kota Bandung” menghasilkan penelitian bahwa bentuk pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung sesungguhnya dapat dipetakan (dikelompokkan) kedalam empat (4) bentuk pembinaan. Keempat bentuk pembinaan yang dimaksudkan adalah: (1) Pembinaan, yang mencakup tiga langkah pembinaan yaitu, pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi sosial; (2) Pemberdayaan; (3) Bimbingan Lanjutan; (4)

Partisipasi Masyarakat. Penelitian tersebut dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui, observasi, wawancara dan dokumentasi. Terdapat relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan berdasarkan kelima penelitian tersebut. Penelitian terdahulu yang telah disebutkan dengan penelitian penulis digunakan untuk mengetahui penggambaran teknik dan perspektif yang digunakan, serta mengetahui arahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial.

Peneliti memfokuskan penelitian pada aspek-aspek proses implementasi yang disebut sebagai *A Model of the Policy Implementation Process*. Yang menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor bebas yang saling terkait, yaitu: (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumber daya; (3) karakteristik organisasi pelaksana; (4) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; (5) sikap para pelaksana; (6) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. (Van Meter dan Van Horn, 1975). Aspek-aspek yang diuraikan tersebut diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Peneliti memfokuskan pada ke-empat aspek yang dapat diteliti di dalam Program Pembinaan Anak Jalanan yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu: (1) standar dan sasaran, karena menurut peneliti dalam program pembinaan kepada anak khususnya anak jalanan memerlukan standar yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan, yakni seperti apa metode pembinaan yang dilakukan pembina kepada sasaran atau anak jalanan, dari standar atau metode pembinaan yang ditetapkan tersebut, sasaran apa yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial dalam menjalankan Program Pembinaan Anak Jalanan.

Aspek selanjutnya, yakni (2) sumber daya, karena sumber daya merupakan suatu aspek yang terpenting dalam melakukan suatu kegiatan, dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana sumber daya manusia atau pembina dalam program, serta sumber daya dukung seperti sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program; (3) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dalam aspek ini peneliti ingin melihat bagaimana komunikasi yang dijalin

antar pelaksana maupun antara pelaksana dengan organisasi di luar pelaksana, apakah dilakukan monitoring dan evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan, dan lain sebagainya. Aspek yang terakhir, yaitu pada aspek (4) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, namun dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus pada satu ekstensi, yakni lingkungan sosial. Peneliti ingin mengetahui apakah lingkungan sosial disekitar mendukung adanya program pembinaan tersebut, seperti halnya apakah ada dukungan dari para orang tua anak jalanan yang di bina terhadap program pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Cimahi. Selain keluarga, lingkungan teman sebaya pun sangat berpengaruh, apakah para anak jalanan di Kota Cimahi saling memotivasi untuk mengikuti program agar mereka mendapat haknya dan kembali kepada keluarga.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan penelitian ini yaitu “Bagaimanakah Implementasi Program Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Cimahi?”. Selanjutnya, rumusan masalah tersebut difokuskan pada:

1. Bagaimana standar dan sasaran yang ingin dicapai dari Program Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Cimahi?
2. Bagaimana sumber daya yang mendukung dalam pelaksanaan Program Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Cimahi?
3. Bagaimana komunikasi dari pelaksana Program Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Cimahi?
4. Bagaimana lingkungan sosial sekitar dalam mendukung Program Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Cimahi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah menggambarkan atau mendeskripsikan serta mengkaji mengenai Implementasi Program Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Cimahi. Terutama mengenai:

1. Standar dan sasaran yang ingin dicapai dari Program Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Cimahi.
2. Sumber daya yang mendukung dalam pelaksanaan Program Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Cimahi.
3. Komunikasi dari pelaksana Program Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Cimahi.
4. Lingkungan sosial sekitar dalam mendukung Program Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Cimahi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran dan menambah konsep-konsep praktik pekerjaan sosial dengan anak, terutama anak jalanan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Dinas Sosial Kota Cimahi khususnya pada penggerak Program Pembinaan Anak Jalanan agar dapat meningkatkan pelaksanaan pembinaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan skripsi yang tertuang dalam Pedoman Penulisan Skripsi Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN memuat tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL memuat tentang tinjauan penelitian terdahulu terkait dengan judul penelitian, tinjauan tentang implementasi, tinjauan tentang anak jalanan,

tinjauan tentang praktik pekerjaan sosial dengan permasalahan anak jalanan.

BAB III METODE PENELITIAN memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, jadwal dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V USULAN PROGRAM memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksanaan program, metode dan teknik, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan dan indikator keberhasilan program.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN memuat tentang gambaran ringkas hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.